

Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Dilla Amadea Pane^{1*}, Muhammad Luthfi², Apip Alansori³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati

Email: dillaamadea013@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of the Internal Control System on the Mechanism of Disbursement of Third Party Funds. This study uses data from observations, interviews and questionnaires distributed to Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

The data collection method used in this study used a questionnaire survey method. The questionnaire survey is a survey method using a research questionnaire. Questionnaire is a set of questions that are systematically arranged and standardized so that the same questions can be asked of each respondent. The results showed that the Control Environment Variable (X_1) had a significant effect on the Mechanism of Third Party Funds Disbursement, Risk Assessment Variable (X_2) had a significant effect on the Mechanism of Third Party Funds Disbursement, Control Procedure Variable (X_3) had a significant effect on the Mechanism of Third Party Funds Disbursement, Variable Monitoring or Monitoring (X_4) has a significant effect on the Mechanism of Disbursement of Third Party Funds, Variable Information and Communication (X_5) has a significant effect on the Mechanism of Disbursement of Third Party Funds

Keywords: Control Environment, Risk Assessment, Control Procedures, Monitoring or Monitoring, Information and Communication, and Third Party Fund Disbursement Mechanisms

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang positif untuk berlangsungnya perekonomian Negara, jika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan maka negara akan bisa mendapat masalah yang sangat besar salah satunya adalah krisis ekonomi dan semakin bengkaknya hutang negara. Dengan diterapkannya suatu sistem mekanisme yang bisa mengatur dan mengelola sumber keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan undang-undang, efisien dan bertanggung jawab maka negara akan bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan baik dan lancar, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 menyebutkan bahwa APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBN harus dikelola dengan baik agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja negara yang baik dapat dilihat pada tingkat realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana. Pembayaran beban atas dana APBN memiliki dua mekanisme yaitu pencairan dana melalui pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan (UP). Pencairan dana langsung dan pencairan dana uang persediaan memiliki perbedaan yaitu pencairan dana langsung digunakan untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai, sedangkan pencairan dana uang persediaan digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dibayarkan melalui pencairan dana langsung. Pemerintah juga mengeluarkan PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas untuk mengoptimalkan perencanaan penarikan atau penyerapan anggaran oleh satuan kerja kementerian atau lembaga.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam mencairkan dana kerap kali terdapat masalah, seperti adanya keterlambatan pencairan dana dan beberapa kasus lainnya, sehingga hal ini akan berdampak cukup signifikan terhadap proses keberlangsungan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Keterlambatan pencairan dana dan beberapa kasus lainnya disebabkan salah satunya oleh kurang lengkapnya dokumen dari pihak ketiga. Hal tersebut terjadi karena pihak ketiga masih banyak yang belum mengetahui baik prosedur maupun dokumen yang diperlukan. Kondisi ini diperkuat dengan adanya permasalahan terkait dengan proses-proses perolehan dana melalui program

yang menjadi belanja rutin tiap tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk memenuhi kebutuhan di daerah Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah diterapkan dengan baik ?
2. Bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung ?

2. Kajian Pustaka

Teori Institutional Isomorphism

DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa organisasi dibentuk oleh kekuatan-kekuatan dari luar organisasi tersebut melalui proses ketaatan (compliance) dan peniruan (dalam Gudono, 2014). Organisasi publik yang perlu untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme dengan organisasi publik lainnya. Struktur dan proses organisasi cenderung menjadi isomorfis atau sama bentuk melalui norma-norma yang dapat mereka terima untuk dilaksanakan. Lebih lanjut DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorphism adalah “constraining process” yang memaksa satu unit di dalam populasi untuk memiliki wujud atau sifat yang sama dengan unit yang lain yang menghadapi kondisi lingkungan yang sama (dalam Gudono, 2014).

Isomorfisme kelembagaan di dalam organisasi publik dapat terjadi karena adanya tekanan institusional yang diakibatkan oleh coercive isomorphism, mimetic isomorphism, atau normative isomorphism (DiMaggio dan Powell, 1983). Coercive isomorphism menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena adanya tekanan-tekanan atau paksaan dari negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Mimetic isomorphism terjadi karena adanya ketidakpastian tentang cara beroperasi atau memproses sesuatu yang mendorong adanya peniruan model dari organisasi lain. Normative isomorphism diasosiasikan dengan proses homogenisasi organisasi karena tuntutan profesional.

Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2017:163) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
3. Mendorong efisiensi

Prosedur Penyelesaian Retur SP2D

Menurut mekanisme penyelesaian Retur SP2D pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 Retur SP2D adalah penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan atau transfer pencairan APBN dari Bank atau Kantor Pos penerima kepada Bank atau Kantor Pos pengirim.

Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2017:163) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan, menurut Krismiaji (2010:218) sistem pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Unsur Sistem Pengendalian Internal

- 1.Lingkungan Pengendalian
- 2.Penilaian Resiko
- 3.Kegiatan Pengendalian
- 4.Pemantauan atau Monitoring
- 5.Informasi dan Komunikasi

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2017:163) menyatakan bahwa tujuan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Pengertian Mekanisme

Istilah prosedur berasal dari bahasa Yunani "mechane". Arti Mechane ialah alat instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, dan peralatan untuk menciptakan sesuatu. Selain Mechane, prosedur juga dari kata "mechos" berarti sarana dan cara menjalankan sesuatu.

Menurut KBBI bahwa definisi mekanisme ialah dunia teknik yang mempunyai arti pemakaian mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin. Lebih jelasnya lagi, prosedur dunia teknik digunakan untuk menjelaskan teori yang sesuai dengan tanda- tanda dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan sistem kerja mesin tanpa dukungan intelegensi sebuah alasannya ataupun juga prinsip kerja.

Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pencairan dana adalah :

- 1.Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
- 2.Memperkuat kemampuan lembaga pemerintah serta melengkapi sarana dan prasarana pembangunan.
- 3.Membiayai kegiatan guna mendorong percepatan pembangunan baik di pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D atau surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUN. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D yaitu, diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. (BPKD:2015).

Retur Surat Pencairan Dana

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim karena nama penerima, alamat, nomor rekening, dan nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank Penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Ambika Ismaya Indri Antika 2020, tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pengeluaran Kas Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pengeluaran Kas Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan sudah baik namun belum maksimal.

3. Metode Penelitian

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) yang didasari oleh filsafat positivisme logikal (logical positivism) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Menurut Sugiyono (2019) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini terdiri dari unit kerja dan pejabat struktural Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Jumlah populasi penelitian ini adalah 30 orang.

Sampel

Menurut Arikunto (2019:109), Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Keuangan dan Aset di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Adapun responden yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah unit kerja dan pejabat struktural yang memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) yang didasari oleh filsafat positivisme logikal (logical positivism) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistic (*logistic regression*) dengan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS), versi 26. Regresi logistik mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent (Masruroh, 2016). Menurut Ghozali (2016) metode regresi logistic sebenarnya mirip dengan analisis diskriminan. Analisis ini ingin menguji apakah terjadinya variabel terikat (*dependen*) dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (*independent*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Lingkungan Pengendalian (X_1) Berpengaruh Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa lingkungan pengendalian pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah berjalan secara efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang diterapkan kepada setiap pegawai, dan aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka dengan peraturan mengenai sistem pengendalian internal seharusnya akan tercipta lingkungan yang efektif, dan akan memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

2. Penilaian Resiko (X_2) Berpengaruh Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah menerapkan penilaian resiko dengan baik dimana untuk mencapai tujuan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, namun sesekali masih terdapat kendala dalam bidang yang diembannya sehingga penilaian resiko masih belum berjalan optimal.

3. Prosedur Pengendalian (X_3) Berpengaruh Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui prosedur pengendalian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah berjalan dengan efektif hanya saja terdapat kendala dikarenakan terlambatnya pencairan dana dan kurang lengkapnya dokumen dari pihak ketiga.

4. Pemantauan atau Monitoring (X_4) Berpengaruh Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dapat dinilai dan ditindaklanjuti. Pemantauan atau monitoring yang ada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung masih terdapat beberapa kendala dalam pencairan dana seperti penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim yang disebabkan karena nama pemilik rekening pada SPM salah.

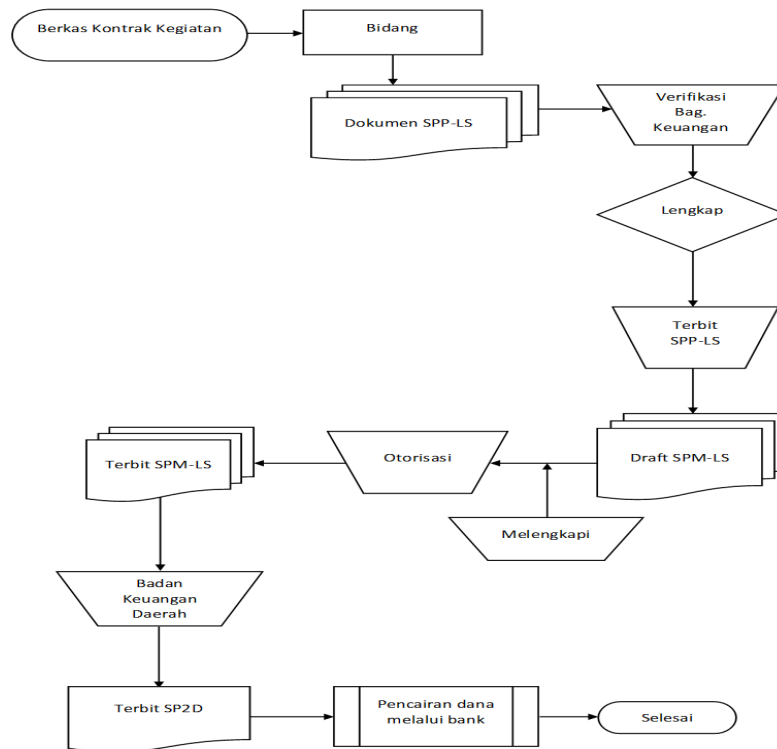
5. Informasi dan Komunikasi (X_5) Berpengaruh Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung telah menerapkan unsur informasi yang tepat dimana sarana/peralatan komunikasi yang dipakai ada berbagai seperti buku pedoman/panduan, surat edaran dan juga komunikasi melalui grup *whatsapp* yang telah dibuat dan berkomunikasi secara lisan juga diterapkan dengan baik.

6. Pembahasan Teori *Institutional Isomorphism*

Mekanisme teori *institutional isomorphism* yang muncul dalam implementasi sistem pengendalian intern pada pelaksanaan pencairan dana di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung adalah *coercive* dan *normative isomorphism*. Mekanisme *coercive isomorphism* muncul ditandai dengan adanya dorongan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan pencairan dana. Mekanisme *normative isomorphism* muncul ditandai dengan adanya kesadaran dari pegawai atas pentingnya pengendalian intern, kode etik, pemisahan fungsi dan otorisasi atas suatu transaksi.

Bagan Alur Pencairan Dana



5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Sistem Pengendalian Internal dalam pelaksanaan Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah berjalan efektif namun masih harus memperhatikan pembinaan sumber daya manusia, identifikasi risiko, penilaian risiko, kesadaran pegawai atas pentingnya pengendalian internal, kode etik dan melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.
2. Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara.
3. Meskipun Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara, namun terdapat kendala yaitu terjadi penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim yang disebabkan karena nama pemilik rekening pada SPM salah, nomor rekening pada SPM salah, nama bank penerima salah, rekening tidak aktif, dan rekening tutup.

Daftar Pustaka

- Andrayani, Rovi. (2014). *Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Pada Dinas Marga Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
- Ardiyos. (2014). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Grafindo Pers.
- Emiliana Antonia Kadmaer. (2020). *Analisis Efektifitas Pencairan Dana Pada Dinas Pemerintah Daerah*. Papua Barat.
- Hera Debijayanti. (2020). *Mekanisme Pencairan Dana Anggaran Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan*. Makassar.
- Nafarin,M. (2014). *Penganggaran Perusahaan*, Edisi ke 3. Salemba empat : Jakarta.
- Ramon, Dolly. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat)*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Regina, Herman, Robert. (2022). *Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)*. Manado.
- Pedoman Pelaksanaan APBD*. (2017). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
- Belajar Bersama Rakyat. (2009). "Pengertian Tentang Mekanisme, Prosedur, Fungsi dan contoh " <http://wargamasyarakat.blogspot.com/2019/01/mekanisme-pengertian-prosedur.html>
- _____.2022. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- _____. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*.